



PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 24/Bappeda/I/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA  
PALU TAHUN 2017

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka pemerintah yang terpadu dan terarah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota Palu sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 Januari 2017

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 24/Bappeda/I/2017  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN  
2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	Jumlah sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1
2	Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu	Jumlah dokumen data potensi SDM	3 Dok
		Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS	4 Dok
3	Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD 0,35 % SMP 0,32 %
		Angka Melek huruf	99,81 %
		Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama	100 %
4	Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni	100 %
		Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	100 %
		Angka usia harapan hidup	70,68 tahun
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	Baik
		Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit :	Baik
		Prevalensi balita gizi buruk	0,66
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	91,30
		1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi.	Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri
7	Terwujudnya pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	102
8	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD	10 OPD
		Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD	6 OPD
9	Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif	Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.	65%
10	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	6 Trayek
		Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	82,59%
		Ketersediaan pelayanan terminal Kota	50%
11	Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
12	Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya	Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro	4
13	Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif	Persentase sampah yang terangkut	60%
		Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	15 ton
		Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	15%
14	Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	51,54%
		Panjang jalan yang terbangun (meter)	234.784
		panjang drainase yang terbangun (meter)	42.104
		persentase drainase kota dalam kondisi baik	43,86%
		persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%
		Akses Sanitasi layak	61,14%
		Cakupan layanan pengguna air bersih	79,27%
		Persentase kawasan kumuh yang tertata	17,61%
		Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)	5 lokasi
15	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial	Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi	46
		Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi	2
		Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	17

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT

